

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2007
TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN JASA KETATAUSAHAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka Pemerintah Daerah harus mampu menggali sumber keuangannya sendiri sehingga dapat menyediakan sumber-sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan;
- b. bahwa pelayanan jasa ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang potensial guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-undang

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

11. Peraturan

11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
12. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2001 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2001 Nomor 2 Seri D);
13. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2001 tentang Dinas-dinas Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2001 Nomor 3 Seri D);
14. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2001 tentang Lembaga Teknis Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2001 Nomor 4 Seri D);
15. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2004 Nomor 2 Seri E Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
dan
GUBERNUR SUMATERA UTARA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN JASA KETATAUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

3. Pemerintah ...

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Retribusi Jasa Ketatausahaan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan kekayaan Daerah.
13. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan di bidang Retribusi Daerah.

14. Surat ...

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
17. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
19. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Setiap pribadi atau Badan yang mendapat pelayanan jasa ketatausahaan wajib membayar Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan.

Pasal 4

Pasal 4

(1) Objek Retribusi adalah pelayanan jasa ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi penyediaan dan atau pemberian :

a. Jasa Umum :

1. Rekomendasi :
 - a. Badan Usaha ;
 - b. Perorangan ;
2. Legalisasi salinan surat kutipan;
3. Legalisasi Lembar Daerah yang memuat Peraturan Daerah
4. Legalisasi Salinan Peraturan Perundang-undangan
5. Dispensasi;
6. Risalah siding atau notulen DPRD;
7. Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) roda 2 dan 3;
8. Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) roda 4;
9. Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) roda 4 keatas/alat-alat berat;
10. Surat Keterangan Fiskal :
 - a. Antar Kabupaten/Kota Kendaraan Bermotor roda 2 dan 3;
 - b. Antar Daerah Kab./Kota Kendaraan Bermotor roda 4 ke atas dan alat-alat berat;
 - c. Antar Propinsi Kendaraan Bermotor roda 2 dan 3;
 - d. Antar Propinsi Kendaraan Bermotor roda 4 ke atas/alat-alat berat;
11. Surat Keterangan Keringanan Denda PKB :
 - a. Roda 2 dan 3;
 - b. Roda 4 ke atas dan alat-alat berat;

12. Surat Keterangan Keringanan Retribusi;
13. Surat Keterangan Pengganti Hilang Tanda Lunas Pajak roda 2 dan 3;
14. Surat Keterangan Pengganti Hilang Tanda Lunas Pajak roda 4;
15. Surat Keterangan Perubahan Sifat Kendaraan Bermotor;
16. Iuran Anggota Perpustakaan;
17. Denda Keterlambatan Pengembalian Buku/Ekemplar/hari;
18. Surat Keterangan Teknis Kendaraan Bermotor ;
19. Sertifikat Kelaikan Kapal;
20. Surat Keterangan Lainnya;
21. Legalisasi Hasil Pengujian Kendaraan Bermotor.

b. Jasa Usaha :

1. Rekomendasi Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer (RPBI) kapasitas diatas 6.000 m³ (> 6.000 m³ / tahun) ;
2. Surat Referensi Pengalaman Pemborongan :
 - a) Klasifikasi Menengah (M) ;
 - b) Klasifikasi Besar (B) ;
3. Pengesahaan dokumen :
 - a) Pengesahan dokumen perencanaan yang dimohon oleh pihak ketiga :
 - 1) Klasifikasi K3 ;
 - 2) Klasifikasi K2 ;
 - 3) Klasifikasi K1 ;
 - 4) Klasifikasi M2 ;
 - 5) Klasifikasi M1 ;
 - 6) Klasifikasi B.
 - b) Pengesahan dokumen Kontrak :
 - 1) Klasifikasi K3 ;
 - 2) Klasifikasi K2 ;
 - 3) Klasifikasi K1 ;
 - 4) Klasifikasi M2 ;

5) Klasifikasi M1 ;

6) Klasifikasi B.

4. Penggunaan Fasilitas :

a) Layanan Internet ;

b) CD/VCD/Mikrofilm ;

c) Kaset Audio;

5. Print out data/informasi terseleksi ;

6. Surat Uji Mutu ;

7. Surat Keterangan Pendaftaran Perusahaan Karoseri Kendaraan Bermotor ;

8. Pengesahan :

a) Pengesahan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi :

1) Pengesahan Pemakaian Bejana Tekan;

2) Pengesahan P2K3;

3) Pengesahan Peraturan Perusahaan;

b) Pengesahan Perindustrian dan Perdagangan :

- Pengesahan Formulir SKA;

9. Kutipan Surat Keputusan Izin Trayek;

c. Perizinan Tertentu :

1. Rekomendasi Izin di Bidang Penelitian dan Pengembangan :

a) Rekomendasi/Izin Penelitian yang dilakukan Lembaga Penelitian PTN/PTS dan Balai Penelitian serta kegiatan penelitian yang dilaksanakan Balitbang Propsi bekerjasama dengan LP dan Balai Penelitian ; dan

b) Rekomendasi/Izin Penelitian yang dilakukan Lembaga Swasta, LSM, Perseorangan.

2. Rekomendasi Izin di Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi :

a) Rekomendasi Boiler;

- b) Rekomondasi Zerro Accident;
 - c) Rekomondasi Izin Permohonan SIUP PJTKI; dan
 - d) Surat Rekomondasi Izin kepada Imigrasi tentang Izin Tinggal/Visa Tinggal.
3. Rekomendasi Izin di bidang Amdal:
- a) Rekomendasi kelayakan lingkungan Amdal kegiatan/usaha dengan SK Gubernur Sumatera Utara;
 - b) Rekomendasi kesepakatan KA Amdal kegiatan/usaha dengan Keputusan Kepala Badan; dan
 - c) Rekomendasi kelayakan lingkungan UKL/UPL.

Pasal 5

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan jasa ketatausahaan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan jasa ketatausahaan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8...

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan kebijakan Daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan jasa ketatausahaan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), per nomor /lembar/set adalah sebagai berikut :

a. Jasa Umum :

1. Rekomendasi :
 - a. Badan Usaha Rp. 20.000,-
 - b. Perorangan Rp. 5.000,-
2. Legalisasi salinan surat kutipan Rp. 2.000,-
3. Legalisasi Lembar Daerah yang memuat Peraturan Daerah Rp. 2.000,-
4. Legalisasi Salinan Peraturan Perundang-undangan Rp. 5.000,-
5. Dispensasi Rp. 5.000,-
6. Risalah sidang atau notulen DPRD Rp. 25.000,-
7. Surat Pendaftaran dan Pendataan Kenadaraan Bermotor (SPPKB) roda 2 dan 3 Rp. 5.000,-
8. Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) roda 4 Rp. 10.000,-
9. Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) roda 4 keatas/alat-alat berat Rp. 15.000,-
10. Surat Keterangan Fiskal :
 - a. Antar Kabupaten/Kota Kendaraan Bermotor roda 2 dan 3 Rp. 10.000,-

- b. Antar Daerah Kab./Kota Kendaraan Bermotor
roda 4 ke atas dan alat-alat berat Rp. 15.000,-
- c. Antar Propinsi Kendaraan Bermotor roda 2 dan 3 Rp. 15.000,-
- d. Antar Propinsi Kendaraan Bermotor roda 4 ke atas/
alat-alat berat Rp. 20.000,-
- 11 Surat Keterangan Keringanan Denda PKB :
 - a. Roda 2 dan 3 Rp. 20.000,-
 - b. Roda 4 ke atas dan alat-alat berat Rp. 50.000,-
- 12 Surat Keterangan Keringanan Retribusi Rp. 5.000,-
- 13. Surat Keterangan Pengganti Hilang Tanda Lunas
Pajak roda 2 dan 3 Rp. 10.000,-
- 14. Surat Keterangan Pengganti Hilang Tanda Lunas
Pajak roda 4 keatas dan alat-alat Berat Rp. 20.000,-
- 15. Surat Keterangan Perubahan Sifat Kendaraan Bermotor Rp. 50.000,-
- 16. Iuran Anggota Perpustakaan per tahun Rp. 10.000,-
- 17. Denda Keterlambatan Pengembalian Buku/Ekmlpar/hari;
- 18. Surat Keterangan Lainnya Rp. 1.000,-
- 19. Legalisasi Hasil Pengujian Kendaraan Bermotor Rp. 5.000,-

b. Jasa Usaha :

- 1. Rekomendasi Rencana Pemenuhan Bahan Baku
Industri Primer (RPBI) kapasitas diatas
6.000 m3 (> 6.000 m3 / tahun) Rp. 500.000,-
- 2. Surat Referensi Pengalaman Pemborongan :
 - a) Klasifikasi Menengah (M) Rp. 100.000,-
 - b) Kalisifikasi Besar (B) Rp. 150.000,-
- 3. Pengesahaan dokumen :
 - a) Pengesahan dokumen perencanaan yang dimohon oleh pihak ketiga:
 - 1) Klasifikasi K3 Rp. 25.000,-
 - 2) Klasifikasi K2 Rp. 50.000,-
 - 3) Klasifikasi K1 Rp. 75.000,-

4) Klasifikasi M2	Rp. 100.000,-
5) Klasifikasi M1	Rp. 250.000,-
6) Klasifikasi B	Rp. 500.000,-
b) Pengesahan dokumen Kontrak :	
1) Klasifikasi K3	Rp. 75.000,-
2) Klasifikasi K2	Rp. 150.000,-
3) Klasifikasi K1	Rp. 200.000,-
4) Klasifikasi M2	Rp. 250.000,-
5) Klasifikasi M1	Rp. 550.000,-
6) Klasifikasi B	Rp. 1.000.000,-
4. Penggunaan Fasilitas :	
a) Layanan Internet per jam	Rp. 3.000,-
b) CD/VCD/Mikrofilm per Unit 1 x Pemakaian	Rp. 500,-
c) Kaset Audio per Unit 1 x Pemakaian	Rp. 500,-
5. Print out data/infomasi terseleksi	Rp. 1.000,-
6. Surat Uji Mutu	Rp. 5.000,-
7. Surat Keterangan Pendaftaran Perusahaan Karoseri Kendaraan Bermotor	Rp. 50.000,-
8. Pengesahan :	
a) Pengesahan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi :	
1) Pengesahan Pemakaian Bejana Tekan	Rp. 2.500,-
2) Pengesahan P2K3	Rp. 10.000,-
3) Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP)	Rp. 20.000,-
b) Pengesahan Perindustrian dan Perdagangan :	
- Pengesahan Formulir SKA	Rp. 2.000,-
9. Kutipan Surat Keputusan Izin Trayek	Rp. 50.000,-

c. Perizinan Tertentu :

1. Rekomendasi di Bidang Penelitian dan Pengembangan :
 - a) Rekomendasi/Izin Penelitian yang dilakukan

- Lembaga Penelitian PTN/PTS dan Balai Penelitian
serta kegiatan penelitian yang dilaksanakan
Balitbang Propsi bekerjasama dengan LP dan
Balai Penelitian Rp. 100.000,-
- b) Rekomendasi/Izin Penelitian yang dilakukan
Lembaga Swasta, LSM, Perseorangan Rp. 25.000,-
2. Rekomendasi Izin di Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi :
- a) Rekomendasi Boiler Rp. 10.000,-
- b) Rekomendasi Zerro Accident Rp. 10.000,-
- c) Rekomendasi Izin Permohonan SIUP PJTKI Rp. 20.000,-
- d) Surat Rekomendasi Izin kepada Imigrasi tentang
Izin Tinggal/Visa Tinggal Rp. 15.000,-
3. Rekomendasi di bidang Amdal :
- a) Rekomendasi kelayakan lingkungan Amdal kegiatan/
Usaha dengan SK Gubernur Sumatera Utara Rp. 250.000,-
- b) Rekomendasi kesepakatan KA Amdal
kegiatan/Usaha dengan Keputusan Kepala Badan Rp.
150.000,-
- c) Rekomendasi kelayakan lingkungan UKL/UPL Rp. 100.000,-

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan jasa ketatausahaan diberikan.

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX ...

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/ atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1), dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT.

BAB XII ...

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Retribusi berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dan ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV ...

BAB XV KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau Pejabat yang diunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.

Pasal 19

- (1) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (2) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3), tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI ...

BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 22

- (1) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 23

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Gubernur dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran; atau
 - d. alasan yang singkat dan jelas.

- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Gubernur.

Pasal 24

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan/keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kepada Wajib Retribusi antara lain pecinta alam, pramuka, lembaga sosial dan lembaga-lembaga lain yang melaksanakan kegiatan sosial.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVIII

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran, atau

- b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 9 ayat (2) sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XX
PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti bagi orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Gubernur.

Pasal 30...

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 7 Agustus 2007

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

RUDOLF M. PARDEDE

Diundangkan di Medan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,

dto.

H. MUHYAN TAMBUSE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2007 NOMOR 6

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN JASA KETATAUSAHAAN**

I. UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka perlu diatur kembali Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan, untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud di atas serta menyesuaikan tarif dan besarnya Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan, dengan situasi dan kondisi pada saat ini.

Untuk maksud tersebut perlu diterbitkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan sebagai pengganti Peraturan Daerah Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 18 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 6